

# KOMUNIKASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM ARENA POLITIK

Susri Adeni & Machyudin Agung Harahap

Universitas Bengkulu, Indonesia

susriadeni@yahoo.com; machyudinagung@gmail.com

---

## Abstrak

Perempuan juga menjadi bagian dari kegiatan politik. Namun sayangnya keterwakilan perempuan belum didengar sepenuhnya dalam ruang publik. Banyak suara perempuan yang belum tersampaikan. Artikel ini mendeskripsikan gambaran umum perempuan dan komunikasi dalam arena politik di Indonesia. Berbagai kasus dari berbagai penelitian yang ada memperlihatkan bahwa komunikasi dan peran perempuan belum signifikan dalam kancah politik atau legislatif. Dominasi laki-laki menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan karena budaya patriarki yang melekat kuat di Indonesia. Namun perempuan tidak berhenti memperjuangkan suaranya. Dedikasi perempuan yang terlihat di beberapa daerah dengan menjadikan perempuan sebagai pemimpin memperlihatkan kiprah dan keinginan perempuan untuk maju dan dapat menyuarakan aspirasi perempuan lainnya.

**Kata kunci:** *gender, komunikasi politik, perempuan, politik*

## POLITICAL COMMUNICATION AND WOMEN REPRESENTATION IN POLITICAL ARENA

### Abstract

Women also become part of political activities. Unfortunately the representation of women has not been heard fully in the public space. Many women's voices have not been conveyed. This article describes the general picture of women and communication in the political arena in Indonesia. Various cases from various studies show that communication and the role of women have not been significant in the political or legislative scene. Male dominance becomes an inseparable part because of the strongly embedded culture of patriarchy in Indonesia. But women do not stop fighting for her voice. Dedication of women seen in some areas by making women as leaders. It shows women's progress and her desire to move forward and can be a representation of other women aspirations.

**Keywords:** *gender, political communication, women, politic*

---

## PENDAHULUAN

Perempuan dan komunikasi arena politik menjadi kajian yang menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan stigma umum bahwa perempuan tidak mampu berpolitik dan hadir seutuhnya dalam kancah politik. Menarik untuk

dicermati bahwa perjuangan perempuan untuk menyuarakan aspirasinya telah berlangsung cukup lama baik di Indonesia maupun secara global. Di awal abad ke-21, lebih dari 95 persen negara di dunia menjamin dua hak demokratis perempuan yang paling mendasar yaitu, hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk

mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for election*). Meskipun kedua hak tersebut sudah diakui oleh banyak negara sebagai hak dasar manusia tanpa adanya bias gender, bagi perempuan hak tersebut didapat melalui proses perjuangan yang panjang (Sugiharto 2014). Di Indonesia, perjuangan hak pilih bagi perempuan dimulai pada tahun 1930-an. Gerakan perempuan Indonesia pada waktu itu mulai menyuarkan hak pilih bagi perempuan. Adapun dalam Kongres Perempuan Indonesia III yang diselenggarakan pada tahun 1938 di Bandung, wacana mengenai hak pilih bagi perempuan masuk sebagai agenda pembahasan (Sugiharto 2014).

Terlihat bahwa perempuan sejak dahulu telah memperjuangkan suara mereka agar didengar dan dapat direalisasikan dalam kehidupan. Demikian pula di parlemen (DPR), perempuan berusaha untuk memperoleh “kursi” agar dapat duduk di parlemen dengan tujuan dapat menyampaikan aspirasi perempuan. Keterwakilan perempuan dalam arena politik (parlemen, DPR) mengalami pasang surut sejak tahun 1950. Keterwakilan perempuan yang terendah adalah pada DPR 1050-1995 (3,7%) (Agustina 2009) dan tertinggi pada DPR 2009-2014 yang berjumlah 100 orang atau 17,86% dan menurun di periode 2014-2019 menjadi 17,32% atau sebanyak 97 orang (Databoks 2017).

Data tersebut memperlihatkan bahwa kuota 30% perempuan di parlemen belum dapat direalisasikan. Laporan perkembangan PBB pada tahun 1995 yang menganalisis gender dan pembangunan di 174 negara menyatakan bahwa: “Meskipun benar bahwa tidak ada hubungan nyata yang terbentuk antar tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan kontribusi mereka terhadap kemajuan perempuan, [tetapi] 30% keanggotaan dalam lembaga-lembaga politik dianggap sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk memberi pengaruh yang berarti dalam politik” (Suryani 2010). Berdasarkan fakta tersebut harapan agar

perempuan duduk di parlemen dapat meningkat hingga 30% sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan juga akan meningkat.

Perempuan dalam kancah politik memang tidak gampang karena budaya patriarki yang masih mendominasi sehingga komunikasi pun terkadang menjadi kendala. Keterwakilan perempuan di parlemen yang sangat timpang sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan seks (kodrat atau takdir), tetapi lebih pada perbedaan gender (konstruksi sosial). Hal ini karena adanya persepsi dan konstruksi sosial yang menutup akses kaum perempuan untuk lebih banyak berkiprah dalam bidang politik (Agustina 2009).

Sehingga yang terjadi karena banyaknya dominasi kaum lelaki di parlemen adalah ketika perempuan duduk dalam lembaga legislatif dimana, maka perempuan harus berkomunikasi secara *gentle* ala laki-laki. Hal ini lakukan agar “suara” perempuan “didengar” dan direalisasikan. Untuk itu diperlukan strategi dalam berkomunikasi dan strategi perempuan itu sendiri agar mendapatkan perhatian dari kaum laki-laki.

## METODE

Metode penulisan artikel ini adalah dengan *literature study* atau studi pustaka dengan menganalisis secara teoritis mengenai perempuan dalam politik, komunikasi politik dan komunikasi gender. *Literature study* ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan topik dan kasus yang akan dibahas yang berupa buku-buku, jurnal dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan tema artikel.

## PEMBAHASAN

Bagian ini mendeskripsikan tentang perempuan dan politik, komunikasi politik dan keterwakilan perempuan dalam arena politik

serta menguraikan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan tema artikel.

### **Perempuan dan Politik**

Dari sejak dahulu perempuan telah memperjuangkan hak-haknya. Sejarah mengenai representasi perempuan di parlemen Indonesia diawali dalam Kongres Wanita Indonesia pertama tahun 1928. Sejak saat itu, dimulailah kesadaran perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang juga termasuk dalam bidang politik. Sejarah mencatat, 6,5 persen anggota parlemen pada pemilu pertama 1965 adalah perempuan. Sampai akhirnya pada tahun 1987 representasi perempuan dalam parlemen mencapai angka tertinggi 13 persen, setelah mengalami pasang surut sebelumnya (Sugiharto 2014). Sehingga wacana keterwakilan 30% perempuan di parlemen pun menjadi sorotan; karena diharapkan dapat menjadi merealisasikan aspirasi perempuan.

Indonesia yang masih menganut sistem patriarkal, menjadi salah satu alasan terbatasnya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses berpolitik. Hal itu dikarenakan persepsi masyarakat yang masih mengotak-ngotakkan pembagian peran antara laki-laki dalam ruang publik dan perempuan dalam ranah domestik (Sugiharto 2014). Perempuan tampaknya mempunyai permasalahan dalam arena politik.

Masalah perempuan dan politik di Indonesia terhimpun sedikitnya dalam empat isu: keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik; komitmen partai politik yang belum sensitif gender sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan; dan kendala nilai-nilai budaya dan interpretasi ajaran agama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki. Dan minat/hasrat/animo para perempuan untuk terjun dalam kancah politik rendah; tapi untuk yang terakhir ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam (Suryani 2010). Seiring berjalannya waktu, partai politik pada dasarnya

telah mulai mendorong kader perempuannya untuk dapat berkiprah di legislatif dan mulai adanya peningkatan minat perempuan untuk terjun di dunia politik. Hal ini sejalan dengan tulisan Sugiharto (2014) dimana pada pemilu 2014, perempuan terutama di kalangan asisten rumah tangga mulai berbicara politik dalam menentukan pilihan mereka. Menarik untuk digaribawahi bahwa adanya perubahan pola pikir perempuan dalam pembelajaran politik. Perempuan pada dasarnya sudah mulai melek politik dan sudah banyak pembelajaran kegiatan sadar berpolitik sehat. Namun tidak sedikit juga partisipasi yang rendah dari perempuan dalam berpolitik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan (faktor internal, dari dalam diri perempuan itu sendiri) dalam bidang politik adalah (Nantri dalam Wahyuni dan Esti 2009):

1. Adanya anggapan di kalangan perempuan bahwa politik itu penuh kekerasan sehingga di pandang sebagai dunianya laki-laki, sehingga perempuan enggan berkecimpung di dalamnya;
2. Banyak perempuan tidak senang berorganisasi;
3. Perempuan kurang memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya bahkan perempuan sendiri kadang-kadang menenggelamkan dirinya dalam dunia domestik sibuk dalam tugas-tugas rumah tangga;
4. Perempuan kurang sering percaya diri, sehingga tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagai perumus kebijakan maupun pengambil keputusan.

Pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang, termasuk juga bidang politik. Namun, hak yang sama itu tidak dibarengi dengan kesempatan yang sama, sehingga keterwakilan perempuan dalam bidang politik menjadi

timpang (Agustina 2009). Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki
2. Pembagian kerja berdasarkan *gender* dalam masyarakat agraris-tradisional
3. Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut
4. Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial
5. Kurangnya *political will* pemerintah
6. Kekurangan kualitas individu perempuan dan kaderisasi politik.

Dalam menjalankan partisipasinya perempuan mendapatkan banyak kendala. Menurut Lycette (dalam Mukarom 2008) terdapat paling sedikit empat kendala bagi perempuan dalam berpartisipasi di bidang politik, yaitu disebabkan karena:

1. Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif dan peran produktif, di dalam maupun di luar rumah;
2. Perempuan relatif memiliki pendidikan yang rendah dibanding dengan laki-laki karena perbedaan kesempatan yang diperoleh;
3. Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan.
4. Adanya hambatan legal bagi perempuan, seperti larangan kepemilikan tanah, larangan berpartisipasi dalam pendidikan atau program Keluarga Berencana tanpa persetujuan dari suami atau ayahnya.

Dari beberapa pendapat para ahli dan hasil penelitian, terlihat bahwa perempuan dalam arena politik masih didominasi oleh kaum laki-laki. Perempuan hanya menduduki porsi kecil dari berbagai jabatan yang ada baik di ranah legislatif maupun bidang lainnya.

## **Komunikasi Politik**

Komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan; pengordinasian makna antara seseorang dan khalayak; saling berbagi informasi, gagasan, atau sikap; saling berbagi unsur-unsur perilaku, atau modus kehidupan, melalui perangkat-perangkat aturan; “penyesuaian pikiran, penciptaan perangkat simbol bersama di dalam pikiran peserta-singkatnya, suatu pengertian”, “suatu peristiwa yang dialami secara internal, yang murni personal” yang dibagi dengan orang lain; atau “pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan menggunakan simbol”. Bahkan ada definisi yang menyatakan apa komunikasi itu dengan mengatakan apa yang bukan: “komunikasi bukan sekedar penerusan informasi dari suatu sumber kepada publik; ia lebih mudah dipahami sebagai penciptaan kembali gagasan-gagasan informasi oleh publik jika diberikan petunjuk dengan simbol, slogan atau tema pokok (Nimmo 1989).

Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. Politik mencakup sesuatu yang dilakukan orang; politik adalah kegiatan (Nimmo 1989). Dalam buku ini, politik merupakan kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya (Nimmo 1989). Komunikasi adalah politik yang selalu terjadi dalam keseharian kita.

Dari kedua konsep: komunikasi dan politik; maka komunikasi politik adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan yang membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat simbol-simbol berarti. Pengertian tersebut menunjukkan pada sikap dan perilaku seluruh individu yang berada dalam lingkup sistem politik, sistem

pemerintahan atau sistem nilai baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat untuk terwujudnya suatu jalinan komunikasi antara pemegang kekuasaan (pemerintah) dengan masyarakat yang mengarah kepada sikap-sikap integratif (AP, 2010 :1.17).

Dari pengertian komunikasi politik tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat strategi yang seharusnya ada ketika berkomunikasi secara politik. Bila dikaitkan dengan keterwakilan perempuan dalam bidang politi, maka hendaknya dari pihak partai politik memiliki strategi komunikasi politik bagi kader perempuannya.

Seperti yang diungkapkan Rush dan Althoff (dalam Suryani 2010) bahwa komunikasi politik memainkan peranan yang amat penting di dalam suatu sistem politik. Ia memerankan elemen dinamis, dan menjadi bagian yang menentukan dari proses-proses sosialisai politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik disatu pihak, dan di pihak lain, komunikasi politik juga bisa menekan partisipasi politik.

Strategi komunikasi dalam kaitan dengan partisipasi perempuan dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu strategi komunikasi politik perempuan dan strategi komunikasi politik partai politik (Mukarom 2008). Strategi komunikasi perempuan dilakukan melalui *counter* komunikasi politik. *Counter* komunikasi politik tentu saja bukan hanya dilakukan oleh politisi perempuan tapi juga harus melibatkan politisi laki-laki (Mukarom 2008). Penelitian yang pernah ada memperlihatkan bahwa perempuan cenderung berkomunikasi secara tidak langsung dibanding dengan laki-laki.

Akibatnya, dalam menyampaikan aspirasi, perempuan belum sepenuhnya aktif dan berani dalam menyuarakan pendapatnya. Menurut hasil survei WRI, terdapat sembilan

anggota DPR perempuan yang aktif menghadiri rapat maupun menyampaikan argumentasi pada rapat-rapat di DPR. Pertama, Nurul Arifin dari Fraksi Partai Golkar dengan nilai 10. Kemudian, disusul oleh Mestariany Habie (Fraksi Gerindra) dengan nilai 6; Ribka Tjiptaning, Ina Ammania, dan Eddy Mihati, seluruhnya dari F-PDI Perjuangan, masing-masing dengan nilai 4; Rieke Diah Pitaloka (F-PDI Perjuangan); Eva Kusuma Sundari (F-PDI Perjuangan); Agustina Basikbaik (FPG); dan Miriam Haryani (F-Hanura) masing-masing dengan nilai 3. Dari hasil temuan WRI, perempuan yang berlatar belakang aktivis memiliki sensitivitas yang tinggi untuk mengangkat isu gender di parlemen (Amalia 2012 ).

Hal ini memperlihatkan juga pentingnya pendidikan komunikasi politik bagi perempuan agar mempunyai keterampilan dan keberanian dalam menyuarakan pendapat dan isu gender di parlemen.

### **Potret Keterwakilan Perempuan dalam Politik**

Seperti yang telah disinggung dari awal bahwa perempuan belum sepenuhnya memenuhi kuota 30% dari anggota legislatif seperti yang diharapkan dan tertuang di UU Nomor 2 tahun 2007 tentang Partai Politik menetapkan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan. Namun realitasnya banyak yang belum memenuhi kuota tersebut.

Tampaknya harapan aktivis perempuan untuk mewujudkan persamaan di bidang politik masih jauh dari kenyataan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas perempuan di parlemen nasional dan daerah belum signifikan. Artinya, jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih jauh dari yang dicita-citakan (di bawah kuota 30 persen). Di samping itu, perempuan yang menduduki posisi strategis dalam kepengurusan parpol juga sangat sedikit. Hal ini berdampak pada proses pencalegan dan keterwakilan

perempuan di parlemen. Dengan demikian, paling tidak ada dua persoalan perempuan dalam politik yaitu masalah partisipasi perempuan yang masih rendah di ruang politik dan masalah belum adanya platform partai yang secara konkret membela kepentingan perempuan (Amalia 2012).

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kurangnya keterwakilan perempuan dalam legislatif, antara lain dari perolehan kursi parlemen di Aceh pada Pemilu 2009 dapat dikatakan bahwa jumlah perempuan yang menduduki kursi Dewan belum signifikan sebab hanya ada empat orang perempuan (5,7 persen dari 69 anggota Dewan) yang menduduki kursi di DPR Aceh (DPRA) provinsi. Hasil Pemilu 2009 untuk DPRD Kota Ternate memperlihatkan meningkatnya keterwakilan perempuan dibandingkan pemilu sebelumnya (2004), yakni empat kursi (16 persen) dari 25 kursi DPRD Ternate dimenangkan oleh caleg perempuan. Jika hasil Pemilu 1999, tidak ada satupun perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD NTB, tidak demikian pada hasil Pemilu 2004 setidaknya tiga perempuan berhasil lolos menjadi anggota DPRD NTB. Tetapi tetap saja memperlihatkan kurangnya keterwakilan perempuan dalam bidang politik. Sementara itu, keterwakilan perempuan di DPR Papua (DPRP)

hanya menyentuh angka 7,14 persen saja. Dominasi laki-laki sangat kental di DPRP, dimana 92,86 persen anggotanya bukan perempuan.

Banyaknya perempuan yang berkiprah di dunia politik ternyata belum mampu menawarkan kultur politik yang berbeda. Perempuan belum mampu menunjukkan diri sebagai agen perubahan. Lemahnya peran perempuan di parlemen terjadi karena kapabilitas perempuan yang lolos ke parlemen kurang teruji. Kebanyakan perempuan yang terpilih dan berkiprah di dunia politik formal saat ini berasal dari dinasti politik atau figur populer seperti artis. Pasalnya, mekanisme perekrutan diwarnai aroma nepotisme, ditambah proses kaderisasi tidak berjalan (Amalia 2012).

Data-data dan fakta di atas menunjukkan bahwa kontribusi perempuan di parlemen belum signifikan. Peningkatan jumlah perempuan di DPR tidak berbanding lurus dengan kualitas. Peran perempuan dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran belum maksimal. Akibatnya, produk parlemen belum mengakomodasi aspirasi serta kepentingan kaum perempuan (Amalia 2012).

## **SIMPULAN**

Perempuan dalam bidang politik selayaknya mendapatkan perhatian dari segala pihak. Dengan demikian perempuan dapat menyuarakan aspirasinya dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dalam ranah politik, partisipasi perempuan yang masih sedikit hendaknya dapat didorong menjadi lebih banyak. Perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang termasuk politik.

Komunikasi politik dan perempuan memiliki strategi yang seharusnya dapat mendorong perempuan untuk berpolitik sehat. Perempuan mendapatkan kesempatan dalam berbicara dan menyuarakan pendapat. Perempuan tidak seharusnya berkomunikasi ala laki-laki sehingga partisipasi perempuan semakin tinggi dalam arena politik. Dengan demikian kiprah perempuan di legislatif dapat terlihat signifikan dalam menyuarakan isu gender.

## DAFTAR PUSTAKA

*Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana

- Agustina, H. (2009). Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender. Dalam Siti Hariti Sastriyani (ed): *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Amalia, L.S. (2012). Perempuan, Partai Politik dan Parlemen di Indonesia: Suatu Analisis. Dalam Sarah Nuraini Siregar (ed): *Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima
- AP, S. 2010. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Databoks. (2017). Berapa Jumlah Anggota DPR RI Perempuan?. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/21/berapa-jumlah-anggota-dpr-ri-perempuan>. Diakses pada 18 November 2017.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang keterwakilan Perempuan di Legislatif. *MediaTor*. Vol. 9. No. 2, Desember: 257-269.
- Nimmo, Dan. 1989. *Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remadja Karya
- Sugiharto, I. (2014). Perempuan Muda dan Partisipasi Politik. <https://www.jurnalperempuan.org/blog-muda1/perempuan-muda-dan-partisipasi-politik>. Diakses pada 18 November 2017.
- Suryani, I. (2010). Partisipasi Perempuan dalam Komunikasi Politik. Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Wahyuni, S & Esti, H. (2009). Pandangan Publik tentang Keputusan Perempuan dalam Kacah Politik di Indonesia. Dalam Siti Hariti Sastriyani (ed):